

# Hasil Evaluasi Penyelarasan KEM-PPKF dan KUA-PPAS 2026

Kode Satker : 990612

Nama Pemda : Kab. Belitung

Verifikator : Provinsi Bangka Belitung

## A. Target Makro

Uraian	Target	Nilai KUA	Keterangan
Pertumbuhan Ekonomi	3,13 - 4,79	2,93	Belum sesuai dengan target yang tercantum dalam Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 Rekomendasi : Pemerintah Kabupaten Belitung agar menyesuaikan target pertumbuhan ekonomi dengan target yang tercantum dalam Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026
Tingkat Kemiskinan	4,91 - 5,81	4,91	Sesuai dengan target yang tercantum dalam Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026

## B. Penyelarasan Narasi KUA

Uraian	Status	Keterangan
Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	SELARAS	<p>1. Pemerintah Kabupaten Belitung agar merealisasikan dan memantau pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan terkait akselerasi investasi (pertumbuhan ekonomi).</p> <p>2. Pemerintah Kabupaten Belitung agar menarasikan dan menyelaraskan dengan detail indikator strategi kewilayahan KEM PPKF Tahun 2026 antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Dukungan reformasi tata kelola investasi daerah melalui digitalisasi pengelolaan keuangan dalam proyek investasi publik;</li><li>b. Penguatan tata kelola investasi seperti deregulasi perizinan, penyederhanaan birokrasi dan peningkatan transparansi pelaksanaan proyek strategis nasional;</li><li>c. Pemberian insentif fiskal PDRD secara selektif untuk sektor unggulan daerah</li></ul>
Kesehatan (Indeks Kesehatan)	SELARAS	<p>1. Pemerintah Kabupaten Belitung agar merealisasikan dan memantau pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan terkait akselerasi investasi (pertumbuhan ekonomi).</p> <p>2. Mempertahankan mandatory spending bidang kesehatan dan pendidikan;</p> <p>3. Pemerintah Kabupaten Belitung agar menarasikan dan menyelaraskan dengan detail indikator strategi kewilayahan KEM PPKF Tahun 2026 antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah.;</li><li>b. Mengakses skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk percepatan penyediaan infrastruktur layanan dasar pendidikan dan kesehatan;</li></ul>
Ketahanan Pangan (Perikanan)	SELARAS	<p>1. Pemerintah Kabupaten Belitung agar merealisasikan dan memantau pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan terkait akselerasi investasi (pertumbuhan ekonomi).</p> <p>2. Pemerintah Kabupaten Belitung agar menarasikan dan menyelaraskan dengan detail indikator strategi kewilayahan KEM PPKF Tahun 2026 antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Penguatan kerja sama antar daerah;</li><li>b. Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur;</li><li>c. Meningkatkan tata kelola pungutan retribusi, terutama untuk tempat pelelangan ikan dan sinkronisasi kebijakan dengan PNBP agar tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi.</li></ul>
Ketahanan Pangan (Pertanian)	BELUM SELARAS	<p>Pemerintah Kabupaten Belitung agar menarasikan dan menyelaraskan dengan detail indikator strategi kewilayahan KEM PPKF Tahun 2026 antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur;</li><li>2. Penyuluhan dan pendampingan untuk mengedukasi petani tentang teknologi dan inovasi pertanian;</li><li>3. Penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan daripada tarif untuk lahan lainnya;</li><li>4. Penguatan kerja sama antar daerah.</li></ul>

Uraian	Status	Keterangan
Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	SELARAS	<p>1. Pemerintah Kabupaten Belitung agar merealisasikan dan memantau pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan terkait akselerasi investasi (pertumbuhan ekonomi).</p> <p>2. Pemerintah Kabupaten Belitung agar menarasikan dan menyelaraskan dengan detail indikator strategi kewilayahan KEM PPKF Tahun 2026 antara lain</p> <p>a. Dukungan APBD dalam mendukung pembinaan kelembagaan dan penguatan SDM Desa serta penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung pengembangan desa mandiri;</p> <p>b. Dukungan APBD untuk meningkatkan kualitas dan kesempatan kerja untuk menekan angka pengangguran melalui belanja daerah untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan vokasi, pengembangan UMKM, dan infrastruktur layanan dasar;</p> <p>c. Dukungan alokasi belanja infrastruktur untuk penyediaan infrastruktur dasar sektor pendidikan dan kesehatan, serta akses layanan internet.</p>
Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	SELARAS	<p>1. Pemerintah Kabupaten Belitung agar merealisasikan dan memantau pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan terkait akselerasi investasi (pertumbuhan ekonomi).</p> <p>2. Pemerintah Kabupaten Belitung agar menarasikan dan menyelaraskan dengan detail indikator strategi kewilayahan KEM PPKF Tahun 2026 antara lain</p> <p>a. Fokus daerah untuk pengembangan inovasi pembelajaran dengan teknologi digital, pedagogi modern, dan pembelajaran koding dan AI;</p> <p>b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah;</p> <p>c. Penguatan DAU earmarked dan evaluasi mandatory spending sektor pendidikan;</p> <p>d. Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan;</p> <p>e. Melakukan skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk peningkatan infrastruktur layanan dasar pendidikan.</p>

### C. Program Prioritas dan Kebijakan Fiskal Nasional

Uraian	Nilai	Keterangan
Belum ada data.		

### D. Mandatory Spending

Uraian	Status	Keterangan
Mandatory Spending		
PDRD		

## Lampiran 2

### Penyelarasaan Narasi KUA

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penyelarasaan	Narasi KUA	Selaras/Belum Selaras	Rekomendasi
Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan reformasi tata kelola investasi daerah melalui digitalisasi pengelolaan keuangan dalam proyek investasi publik;</li> <li>• Penguatan tata kelola investasi seperti deregulasi perizinan, penyederhanaan birokrasi dan peningkatan transparansi pelaksanaan proyek strategis nasional;</li> <li>• Alokasi belanja ekonomi yang mendukung Pengembangan koridor industri melalui hilirisasi timah dan bauksit, hilirisasi kelapa sawit, dan industri makanan dan minuman;</li> <li>• Mendorong belanja untuk mendukung kapasitas tenaga kerja yang selaras dengan potensi daerah serta kewirausahaan UMKM;</li> <li>• Peningkatan dukungan belanja infrastruktur untuk mendukung peningkatan kualitas Kawasan pariwisata;</li> <li>• Meningkatkan persentase pemenuhan earmarking PKB dan opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, untuk mendukung konektivitas;</li> <li>• Pemberian insentif fiskal PDRD secara selektif untuk sektor unggulan daerah.</li> </ul>	none	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemenuhan earmarking PKB dan opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, untuk mendukung konektivitas dapat dilihat dari Belanja wajib yang didanai dari hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB dialokasikan sebesar Rp. 7.386.882.529,00 atau sebesar 49,25% (Halaman 42).</li> <li>2. Terdapat tiga sektor penyumbang perekonomian terbesar, yakni sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sektor Industri Pengolahan, dan sektor Konstruksi. Struktur ekonomi Kabupaten Belitung memang masih didominasi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 27,10% pada tahun 2024. Kategori lainnya yang menyumbang lebih dari 10% selama 5 (tahun) terakhir adalah sektor industri pengolahan, sektor konstruksi dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (Halaman 10)</li> <li>3. Kabupaten Belitung mendukung Kebijakan ekonomi yang berfokus pada upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat (well-being. Melalui tema kebijakan fiskal: "Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi", maka dukungan APBN Tahun 2026 untuk fondasi jangka menengah akan berfokus pada pemberdayaan koperasi, dan UMKM untuk ekonomi daerah (Halaman 5)</li> <li>4. Dengan memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian nasional dan regional</li> </ol>	SELARAS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Kabupaten Belitung agar merealisasikan dan memantau pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan terkait akselerasi investasi (pertumbuhan ekonomi).</li> <li>2. Pemerintah Kabupaten Belitung agar menarasikan dan menyelaraskan dengan detail indikator strategi kewilayahan KEM PPKF Tahun 2026 antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dukungan reformasi tata kelola investasi daerah melalui digitalisasi pengelolaan keuangan dalam proyek investasi publik;</li> <li>b. Penguatan tata kelola investasi seperti deregulasi perizinan, penyederhanaan birokrasi dan peningkatan transparansi pelaksanaan proyek strategis nasional;</li> <li>c. Pemberian insentif fiskal PDRD secara selektif untuk sektor unggulan daerah</li> </ol> </li> </ol>

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penyelarasan	Narasi KUA	Selaras/Belum Selaras	Rekomendasi
			Kepulauan Bangka Belitung, maka skenario laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung pada tahun 2026 akan tumbuh pada kisaran 3,23 persen. Target tersebut juga mempertimbangkan kemungkinan risiko dampak atas krisis global, gangguan rantai pasok dan krisis energi, serta pertumbuhan pada sektor pariwisata pasca dikembalikannya status Bandara HAS. Hanandjoedin sebagai bandara internasional (halaman 14).		
Kesehatan (Indeks Kesehatan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar pendidikan (unggulan dan vokasi) dan layanan dasar kesehatan;</li> <li>• Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar kesehatan, dengan peningkatan kualitas untuk penguatan layanan kesehatan;</li> <li>• Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah.;</li> <li>• Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan Pembiayaan Utang Daerah dan TKD dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan;</li> <li>• Mengakseskema sinergi pendanaan dan creative financing untuk percepatan penyediaan infrastruktur layanan dasar pendidikan dan kesehatan;</li> <li>• Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan.</li> </ul>	none	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar pendidikan (unggulan dan vokasi) dapat dilihat dari Belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD sebesar Rp.473.189.744.290,00 atau sebesar 42,94 % dari total belanja daerah (halaman 42)</li> <li>2. Pemenuhan earmarking pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan dapat dilihat pada Belanja wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak Rokok yang dialokasikan sebesar Rp. 9.592.674.000,00 atau sebesar 99,99% (Halaman 42).</li> <li>3. Arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Belitung Tahun 2026 mengacu kepada dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029 salah satunya adalah Melakukan review dan penyesuaian NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) Tanah dan Bangunan mendekati Harga Pasar secara berkala khususnya di wilayah wilayah yang secara signifikan mengalami pertumbuhan ekonomi (halaman 17)</li> </ol>	SELARAS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Kabupaten Belitung agar merealisasikan dan memantau pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan terkait akselerasi investasi (pertumbuhan ekonomi).</li> <li>2. Mempertahankan mandatory spending bidang kesehatan dan pendidikan;</li> <li>3. Pemerintah Kabupaten Belitung agar menarasikan dan menyelaraskan dengan detail indikator strategi kewilayahan KEM PPKF Tahun 2026 antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah.;</li> <li>b. Mengakseskema sinergi pendanaan dan creative financing untuk percepatan penyediaan infrastruktur layanan dasar pendidikan dan kesehatan;</li> </ol> </li> </ol>

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penyelarasan	Narasi KUA	Selaras/Belum Selaras	Rekomendasi
Ketahanan Pangan (Perikanan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan belanja untuk perluasan akses pasar dan distribusi hasil perikanan;</li> <li>• Penguatan kerja sama antar daerah;</li> <li>• Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur;</li> <li>• Optimalisasi belanja daerah untuk mendukung industri pengolahan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk perikanan;</li> <li>• Meningkatkan tata kelola pungutan retribusi, terutama untuk tempat pelelangan ikan dan sinkronisasi kebijakan dengan PNBP agar tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi.</li> </ul>	none	<p>1. Pada Kabupaten Belitung sendiri target kinerja NTN masih diatas target provinsi dan diatas kenaikan rata-rata nasional yaitu di angka 111 dan laju pertumbuhan produksi perikanan tangkap sebesar 0.55 % dengan dukungan Pemerintah Daerah berupa penguatan belanja untuk perluasan akses pasar dan distribusi hasil perikanan, kerja sama antar daerah, peningkatan infrastruktur, dukungan terhadap industri pengolahan dan tata kelola pungutan retribusi (Halaman 15).</p>	SELARAS	<p>1. Pemerintah Kabupaten Belitung agar merealisasikan dan memantau pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan terkait akselerasi investasi (pertumbuhan ekonomi).</p> <p>2. Pemerintah Kabupaten Belitung agar menarasikan dan menyelaraskan dengan detail indikator strategi kewilayahan KEM PPKF Tahun 2026 antara lain:</p> <p>a. Penguatan kerja sama antar daerah;</p> <p>b. Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur;</p> <p>c. Meningkatkan tata kelola pungutan retribusi, terutama untuk tempat pelelangan ikan dan sinkronisasi kebijakan dengan PNBP agar tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi.</p>

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penyelarasan	Narasi KUA	Selaras/Belum Selaras	Rekomendasi
Ketahanan Pangan (Pertanian)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur;</li> <li>• Penyuluhan dan pendampingan untuk mengedukasi petani tentang teknologi dan inovasi pertanian;</li> <li>• Penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan daripada tarif untuk lahan lainnya.</li> <li>• Penguatan kerja sama antar daerah</li> </ul>	none		BELUM SELARAS	<p>Pemerintah Kabupaten Belitung agar menarasikan dan menyelaraskan dengan detail indikator strategi kewilayahan KEM PPKF Tahun 2026 antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur;</li> <li>2.Penyuluhan dan pendampingan untuk mengedukasi petani tentang teknologi dan inovasi pertanian;</li> <li>3.Penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan daripada tarif untuk lahan lainnya;</li> <li>4.Penguatan kerja sama antar daerah.</li> </ol>

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penyelarasan	Narasi KUA	Selaras/Belum Selaras	Rekomendasi
Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan APBD dalam mendukung pembinaan kelembagaan dan penguatan SDM Desa serta penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung pengembangan desa mandiri;</li> <li>• Dukungan APBD untuk meningkatkan kualitas dan kesempatan kerja untuk menekan angka pengangguran melalui belanja daerah untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan vokasi, pengembangan UMKM, dan infrastruktur layanan dasar;</li> <li>• Dukungan alokasi belanja infrastruktur untuk penyediaan infrastruktur dasar sektor pendidikan dan kesehatan, serta akses layanan internet;</li> <li>• Menjaga kepatuhan pemenuhan kewajiban earmarking pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI guna mengurangi beban masyarakat miskin.</li> </ul>	none	1. Belanja infrastruktur pelayanan publik dialokasikan sebesar Rp. 193.628.378.444,70 atau sebesar 19,45 % dari total belanja daerah tahun 2026 (Halaman 42) 2. Menjaga kepatuhan pemenuhan kewajiban earmarking pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI guna mengurangi beban masyarakat miskin sudah dilakukan oleh Kabupaten Belitung, ini dapat dilihat dari Belanja wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak Rokok dialokasikan sebesar Rp. 9.592.674.000,00 atau sebesar 99,99% (Halaman 42)	SELARAS	1. Pemerintah Kabupaten Belitung agar merealisasikan dan memantau pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan terkait akselerasi investasi (pertumbuhan ekonomi). 2. Pemerintah Kabupaten Belitung agar menarasikan dan menyelaraskan dengan detail indikator strategi kewilayahan KEM PPKF Tahun 2026 antara lain a. Dukungan APBD dalam mendukung pembinaan kelembagaan dan penguatan SDM Desa serta penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung pengembangan desa mandiri; b. Dukungan APBD untuk meningkatkan kualitas dan kesempatan kerja untuk menekan angka pengangguran melalui belanja daerah untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan vokasi, pengembangan UMKM, dan infrastruktur layanan dasar; c. Dukungan alokasi belanja infrastruktur untuk penyediaan infrastruktur dasar sektor
					pendidikan dan kesehatan, serta akses layanan internet.

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penyelarasan	Narasi KUA	Selaras/Belum Selaras	Rekomendasi
Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fokus daerah untuk pengembangan inovasi pembelajaran dengan teknologi digital, pedagogi modern, dan pembelajaran koding dan AI;</li> <li>• Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar pendidikan (unggulan dan vokasi) dan mempertahankan kinerja layanan dasar pendidikan;</li> <li>• Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah;</li> <li>• Penguatan DAU earmarked dan evaluasi mandatory spending sektor pendidikan;</li> <li>• Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan;</li> <li>• Melakukan skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk peningkatan infrastruktur layanan dasar pendidikan.</li> </ul>	none	1. Pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar pendidikan (unggulan dan vokasi) dan mempertahankan kinerja layanan dasar pendidikan sudah dilakukan, ini dapat dilihat dari Belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD sebesar Rp. 473.189.744.290,00 atau sebesar 42,94 % dari total belanja daerah tahun 2026 (Halaman 42).	SELARAS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Kabupaten Belitung agar merealisasikan dan memantau pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan terkait akselerasi investasi (pertumbuhan ekonomi).</li> <li>2. Pemerintah Kabupaten Belitung agar menarasikan dan menyelaraskan dengan detail indikator strategi kewilayahan KEM PPKF Tahun 2026 antara lain <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Fokus daerah untuk pengembangan inovasi pembelajaran dengan teknologi digital, pedagogi modern, dan pembelajaran koding dan AI;</li> <li>b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah;</li> <li>c. Penguatan DAU earmarked dan evaluasi mandatory spending sektor pendidikan;</li> <li>d. Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan;</li> </ol> </li> </ol>

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penyelarasan	Narasi KUA	Selaras/Belum Selaras	Rekomendasi
					e.Melakukan skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk peningkatan infrastruktur layanan dasar pendidikan.

### Lampiran 3

#### Program Prioritas dan Kebijakan Fiskal Nasional

##### Indeks 1: Referensi

Klasifikasi	Jumlah Subkegiatan di Referensi	Jumlah Subkegiatan di PPAS	Skor
Belum ada data.			

##### Indeks 2: Unit Cost

	Anggaran	Penduduk	Unit Cost
Belum ada data.			

##### Indeks 3: Budget Optimizer

Klasifikasi	Nilai	Total Belanja	Persentase	Target Budget Optimizer	Skor
Belum ada data.					

##### Evaluasi

Skor Indeks	Keterangan
Belum ada data.	

**Lampiran 4**

**Mandatory Spending**

Jenis	Nilai KUA/PPAS	Total Belanja	Persentase	Batasan	Status	Catatan
Belum ada data.						

**PDRD**

Jenis	Nilai KUA/PPAS	Total Pendapatan	Nilai Minimal	Persentase	Batasan	Status	Catatan
Belum ada data.							